



# **PIAGAM**

No: In. 06.3/D.1/PP.00.9/400L.A/201

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang  
memberikan penghargaan kepada:

**Dr. Muslih, MA.**

NIP. 19690813 199603 1 003

atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan Diskusi Dosen  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang sebagai:

## **PEMAKALAH**

Dengan tema/judul:

Kerajaan Islam Nusantara dan Penetrasi Politik Hindia Belanda

Semarang, 12 Juli 2013

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Drs. H. Shodiq, M.Ag.**

NIP. 19681205 199403 1003

# KERAJAAN ISLAM NUSANTARA DAN PENETRASI POLITIK HINDIA BELANDA<sup>1</sup>

Oleh: Dr. Muslih, M.A.<sup>2</sup>

## I. PENDAHULUAN

Mengetahui dan memahami sejarah perkembangan Islam di nusantara pada masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu topik yang menarik untuk didiskusikan ketika bicara tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Para pengkaji sejarah Indonesia, utamanya sejarah Islam, perlu informasi yang mendalam mengenai hal tersebut. Makalah ini ingin mengkaji bagaimana sebenarnya kondisi dan situasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada saat sebelum kemerdekaan dan bagaimana pula penetrasi politik Hindia Belanda saat itu. Untuk mengetahui secara lebih detail tentang masalah ini akan dibahas beberapa masalah yang secara garis besar dituangkan dalam rumusan masalah berikut. (1) Bagaimana Situasi dan Kondisi Kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda Datang? (2) Apa Latar Belakang Kedatangan VOC Hindia Belanda? (3) Bagaimana Penetrasi Politik dan Politik Islam Hindia Belanda?

## II. PEMBAHASAN

### A. Situasi dan Kondisi Kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda Datang

Bicara tentang situasi dan kondisi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada masa menjelang kedatangan bangsa Belanda pada akhir abad ke-16 dan abad ke-17 bisa dikatakan bahwa secara garis besar keadaannya berbeda-beda baik dalam proses islamisasi yang terjadi di dalamnya maupun kemajuan politik yang dialaminya. Pada saat Belanda datang, di pulau Sumatera penduduk Islam sudah ada sekitar tiga abad, sementara di pulau Maluku dan pulau Sulawesi proses islamisasinya baru saja berlangsung.

Di pulau Sumatera kondisi kerajaan dan masyarakat Islam sudah lama terbentuk. Pada abad ke-16, kerajaan Aceh menjadi sangat dominan, terutama karena para pedagang di sana menghindari dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Aceh berusaha menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan Nusantara. Bahkan, ia mencoba menguasai pelabuhan-pelabuhan pengekspor lada, yang ketika itu sedang banyak permintaan. Setelah berhasil menguasai daerah-daerah di Sumatera bagian Utara, Aceh berusaha menguasai Jambi, pelabuhan pengekspor lada yang banyak dihasilkan di daerah-daerah pedalaman, seperti di Batanghari. Jambi, yang ketika itu sudah Islam, juga merupakan pelabuhan transit, tempat beras dan bahan-bahan lain dari Jawa, Cina, India, dan lain-lain diekspor ke Malaka. Selain itu, ekspansi

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada forum diskusi dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Walisongo Semarang, pada tanggal 11 Juli 2013.

<sup>2</sup> Penulis adalah dosen tetap (Lektor Kepala dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam) pada fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK).

Aceh ketika itu berhasil menguasai perdagangan pantai barat Sumatera dan mencakup Tiku, Pariaman, dan Bengkulu. Ketika itu, Aceh memang sedang berada pada masa kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda. Beliau wafat dalam usia 46 tahun pada 27 Desember 1636.<sup>3</sup>

Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, beliau digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani, yang berasal dari Pahang. Di zaman pemerintahannya, Aceh dan Semenanjung Tanah Melayu telah melalui satu zaman yang berbeda dari yang pernah dialami sejak Iskandar muda berkuasa. Secara khusus, Kerajaan Aceh yang dipimpin Iskandar Tsani tidak lagi mengikuti satu dasar luar yang militan. Sebagai seorang yang wara', Iskandar Tsani mencurahkan perhatiannya ke arah pembangunan masyarakat dan mengembangkan pendidikan Islam. Usahnya untuk menyebarkan ajaran Islam tidak saja terbatas di daerah-daerah Aceh besar, tetapi beliau juga mengirimkan surat dan dua buah kitab, yaitu, "Surat Al Mustaqim" dan "Babun Nikah", kepada Sultan Kedah (sekarang Malaysia) ketika mengetahui bahwa Islam telah berkembang pesat di sana.<sup>4</sup>

Setelah beliau meninggal dunia Aceh secara berturut-turut dipimpin oleh tiga orang wanita selama 59 tahun. Ketika itulah Aceh mulai mengalami kemunduran. Daerah-daerah di Sumatera yang dulu berada di bawah kekuasaannya mulai memerdekakan diri. Meskipun sudah jauh menurun, Aceh masih dapat bertahan lama menikmati kedaulatannya dari intervensi kekuasaan asing.

Di pulau Jawa, pada saat kedatangan bangsa Belanda, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, yaitu dari Demak ke Pajang kemudian ke Mataram. Pada tahun 1619, seluruh Jawa Timur praktis sudah berada di bawah kekuasaan Mataram, yang ketika itu di bawah Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah, kontak-kontak bersenjata antara kerajaan Mataram dengan VOC mulai terjadi. Meskipun ekspansi Mataram telah menghancurkan kota-kota pesisir dan mengakibatkan perdagangan setengahnya menjadi lumpuh, namun sebagai penghasil utama dan pengeksport beras, posisi Mataram dalam jaringan perdagangan di Nusantara masih berpengaruh.

Sementara itu, di pantai Jawa bagian Barat, Banten muncul sebagai daerah penting karena perdagangan ladanya dan sebagai tempat penampungan pelarian dari pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu, Banten juga menarik perdagangan lada dari Indrapura, Lampung, dan Palembang. Produksi ladanya sendiri sebenarnya kurang berarti. Merosotnya peran pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur akibat politik Mataram dan munculnya Makassar sebagai pusat perdagangan membuat jaringan perdagangan dan rute pelayaran dagang di Indonesia mulai bergeser. Kalau di awal abad ke-16, rute yang ditempuh ialah Maluku - Jawa - Selat Malaka, maka di akhir abad itu menjadi Maluku - Makassar - Selat Sunda.

Di pulau Sulawesi, pada akhir abad ke-16, pelabuhan Makassar berkembang dengan pesat. Hal ini dikarenakan letaknya memang sangat strategis, yaitu tempat persinggahan ke Maluku,

---

<sup>3</sup> Badri Yatim, 2008, *Sejarah Peradaban Islam Dirosah Islamiyah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 231-232

<sup>4</sup> A. Hasmy, 1989, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Percetakan Offset), hlm. 244-245

Filipina, Cina, Patani, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Indonesia bagian Barat. Sementara itu Maluku, Banda, Seram, dan Ambon sebagai pangkal atau ujung perdagangan rempah-rempah menjadi sasaran pedagang Barat yang ingin menguasainya dengan politik monopolinya. Ternate dan Tidore dapat terus dan berhasil mengelakkan dominasi total dari Portugis dan Spanyol, namun ia mendapat ancaman dari Belanda yang datang ke sana.<sup>5</sup>

## B. Latar Belakang Kedatangan VOC Hindia Belanda

Fakta telah menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia telah menyebabkan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Fakta yang juga tidak terbantahkan adalah kondisi Indonesia yang kaya raya dengan rempah-rempah dan hasil alam lainnya. Hal tersebut membuat bangsa-bangsa Barat berdatangan ke Indonesia, diantaranya Portugis di tahun 1512, kemudian disusul Spanyol pada tahun 1521, lalu Prancis pada tahun 1529, dan Belanda tahun 1596, baru Inggris datang kemudian.<sup>6</sup> Dalam makalah ini penulis hanya akan mengupas secara khusus kedatangan bangsa Belanda saja sesuai dengan topik pembahasan.

Perlu diketahui bahwa tujuan Belanda datang ke Indonesia, pertama-tama adalah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Perseroan Amsterdam mengirim armada kapal dagangnya yang pertama ke Indonesia tahun 1595, terdiri dari empat kapal, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Menyusul kemudian angkatan kedua tahun 1598 di bawah pimpinan Van Nede, Van Heemskerck dan Van Warwijck. Di samping dari Amsterdam, juga datang beberapa kapal dari berbagai kota di Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 di bawah pimpinan Van der Hagen, dan angkatan keempat tahun 1600 di bawah pimpinan Van Neck.

Melihat hasil yang diperoleh Perseroan Amsterdam itu, banyak perseroan lain berdiri yang juga ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan maret 1602 perseroan-perseroan itu bergabung dan disahkan oleh *Staten-General Republik* dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan dikawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Solomon, termasuk kepulauan Nusantara. Perseroan itu bernama *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*, serikat dagang ini berdiri pada maret 1602. Isi piagam itu memberikan mandat bahwa VOC, di samping berdagang dan berlayar, juga diberi hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka menunjang usaha perdagangannya. Boleh jadi, hak politik itu diberikan karena hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara Eropa lainnya, seperti Portugis yang datang ke kepulauan Indonesia hampir seabad sebelum Belanda.

Dalam pelayaran angkatan pertama, VOC sudah mencapai Banten dan Selat Bali. Pada pelayaran kedua, mereka sampai ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Dalam pelayaran

---

<sup>5</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 232-234

<sup>6</sup> Fatah Syukur, 2010, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), hlm. 214

angkatan ketiga, mereka sudah terlibat perang melawan Portugis di Ambon tetapi gagal, yang memaksa mereka untuk mendirikan benteng tersendiri. Mereka kali ini sudah berhasil membuat kontrak dengan pribumi mengenai jual beli rempah-rempah. Dalam pelayaran angkatan keempat, mereka membuka perdagangan dengan Banten dan Ternate, tetapi mereka gagal merebut benteng Portugis di Tidore.<sup>7</sup>

Kehadiran VOC di kepulauan nusantara ini tak diragukan lagi memberikan efek atau akibat yang tidak menyenangkan bagi penduduk pribumi dalam hal perdagangan. Lebih dari itu, kedatangan orang-orang Belanda di Indonesia tersebut juga telah mengancam institusi perpolitikan umat Islam saat itu. Bahaya ini belum mengancam ketika motif petualangan dan ekonomi masih dijalankan secara wajar, banyak penguasa lokal muslim yang menyambutnya dengan ramah. Akan tetapi ketika keinginan memonopoli perdagangan telah mulai timbul, orang-orang Belanda pun mulai mengintervensi institusi perpolitikan Islam di Indonesia yang pada umumnya memang tidak stabil.<sup>8</sup>

Adapun tujuan Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut VOC ini adalah untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan bangsa-bangsa Barat lainnya. Seperti serikat dagang dari bangsa Barat lainnya, maka VOC juga ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan mereka. Untuk tujuan inilah VOC merasa perlu untuk memonopoli ekspor dan impor perdagangan.<sup>9</sup> Karena keinginan dan aktivitasnya yang ingin menguasai perdagangan di Indonesia maka VOC mendapatkan perlawanan dari pedagang-pedagang pribumi yang merasa kepentingan ekonominya terancam. Karena sistem monopoli itu bertentangan dengan sistem tradisional yang dianut oleh masyarakat pribumi. Sikap Belanda yang memaksakan kehendak dengan kekerasan itu makin memperkuat sikap permusuhan pribumi tersebut. Namun, secara politis VOC dapat menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dalam waktu yang cepat.

Pada tahun 1798, VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Sebelumnya, pada 1795 izin operasinya dicabut. Kemunduran, kebangkrutan dan dibubarkannya VOC disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap dan korup, hutang besar, dan sistem monopoli serta sistem paksa dalam pengumpulan bahan-bahan atau hasil tanaman penduduk menimbulkan kemerosotan moral baik para penguasa maupun penduduk yang sangat menderita.

Setelah VOC bubar pada pergantian abad ke-18 (1798), maka secara resmi Indonesia pindah ke tangan pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda ini berlangsung sampai tahun 1942, dan hanya diinterupsi pemerintahan Inggris selama beberapa tahun pada 1811-1816. Sampai tahun 1811, pemerintahan Hindia Belanda tidak mengadakan perubahan yang berarti. Bahkan pada tahun 1816, Belanda malah memanfaatkan daerah jajahan untuk memberi keuntungan sebanyak-

---

<sup>7</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 234-235

<sup>8</sup> Nur Huda, 2007, *Sejarah Sosial Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm. 81

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.81-82

banyaknya kepada negeri induk, guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami kebangkrutan akibat perang.

Pada tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem tanam paksa. Setelah terusan Suez dibuka dan industri di negeri Belanda sudah berkembang pemerintah colonial Belanda menerapkan politik liberal di Indonesia. Perusahaan dan modal swasta dibuka seluas-luasnya. Meskipun dalam politik liberal itu kepentingan dan hak pribumi mendapat perhatian, tetapi pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Baru pada tahun 1901 Belanda menerapkan politik etis, politik balas budi.<sup>10</sup>

### C. Penetrasi Politik dan Politik Islam Hindia Belanda

#### 1. Penetrasi Politik Belanda

Dengan perlengkapan yang lebih maju, VOC melakukan politik ekspansi. Boleh dibilang ekspansi menjelang akhir abad ke-18 berhasil di Jawa. Belanda telah meluaskan kekuasaannya dalam pemerintahan Mataram karena Amangkurat II (1697-1703) meminta bantuan VOC untuk memadamkan pemberontakan Tunjojoyo, Adipati Madura dan pemberontakan Kajoran dan dipercepat oleh konflik internal dalam istana.<sup>11</sup> Pada masa Amangkurat III Mataram mengalami krisis, sementara Belanda telah menggerogoti wilayah dan kekuasaannya. Memang setiap bantuan yang diberikan Belanda harus dibayar dengan wilayah dan konsesi dagang. Meluasnya pengaruh Belanda dalam pemerintahan Mataram, dipercepat oleh konflik internal dalam istana. Karena konflik itulah, Mataram pada tahun 1755 pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, tahun 1757 muncul kekuasaan Mangkunegara dan akhirnya pada tahun 1813 kekuasaan Pakualam.

Sementara itu, sebagai tetangga terdekat dari basis VOC di Batavia (Jakarta), Banten segera mengalami kemunduran disebabkan oleh politik monopoli VOC. Hubungan dagang antara Banten dan Malaka sebelumnya sangat baik. Rempah-rempah dan lada diperoleh Portugis dari Banten dan Portugis menjual bahan pakaian di Banten. Namun, ketika Ambon dan Banda diblokade Belanda, perdagangan rempah-rempah di Banten menyusut drastis karena perdagangan beralih ke Makassar, sedangkan permintaan bahan pakaian sangat terbatas.

Hubungan Banten dengan Belanda menjadi runcing ketika Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta tahun 1651. Ia sangat memusuhi Belanda, karena Belanda dipandanginya menghalangi usaha Banten memajukan dunia perdagangan. Pada tahun 1656, dua kali kapal Belanda dirampas Banten, tetapi itu tidak menimbulkan perang terbuka antara dua belah pihak.

Anak Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji, yang diangkat menjadi Sultan Muda tahun 1676, ternyata tidak menyenangi sikap politik ayahnya yang memusuhi Belanda. Ia ingin

---

<sup>10</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 235-236

<sup>11</sup> Fatah Syukur, 2010, hlm. 215

mengadakan hubungan baik dengan orang Barat ini. pada 27 Februari 1682, Sultan Ageng Tirtayasa menyerang Surosowan, istana Sultan Haji, yang ketika itu sudah menjadi pemimpin kerajaan Banten. Serangan ini dapat dipatahkan berkat bantuan Belanda, tetapi dengan demikian, Banten praktis berada di bawah kekuasaan Belanda.<sup>12</sup>

Penetrasi Belanda dalam dunia politik seringkali justru diundang oleh konflik internal suatu kerajaan atau konflik antar kerajaan Indonesia. Yaitu di Sulawesi terdapat konflik dalam negeri antara Gowa-Tallo dengan Bone. Sehingga VOC mampu memonopoli di Makassar maupun di Indonesia bagian Timur.<sup>13</sup>

Sementara itu, sebagai dua kerajaan yang selalu bersaing, Gowa-Tallo dan Bone terus terlibat konflik, meskipun sewaktu-waktu terhenti. Ketika terjadi pertentangan mengenai monopoli antara Gowa dan VOC, Sultan Gowa, Sultan Hasanuddin, mengambil langkah mengadakan pengawasan ketat terhadap Bone dan mengerahkan tenaga kerja untuk memperkuat pertahanan Makassar.

Dalam pertempuran antara Gowa dan Bone, Bone mengalami kekalahan besar. Orang-orang Bugis kemudian bersatu di bawah pimpinan Arung Palaka untuk melawan Makassar. VOC mendapat keuntungan besar dari persekutuan orang-orang Bugis itu, persekutuan Soppeng dan Bone, bahkan Belanda juga berhasil mengajak Ternate untuk terlihat dalam peperangan melawan Makassar. Dalam peperangan itu, Makassar mengalami kekalahan konfrontasi antara Makassar dan VOC baru berakhir setelah diadakan gencatan senjata pada tanggal 6 November 1667, kemudian perjanjian Bongaya tanggal 13 November 1667. Isi perjanjian itu terutama menekankan prinsip hidup berdampingan secara serasi dalam suasana perdamaian.

Pada waktu gencatan senjata berlangsung, sebelum perjanjian disepakati, antara Speelman dari pihak Belanda dan Sultan Hasanuddin diadakan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan persetujuan. Tuntutan Speelman berisi kepentingan VOC dalam bidang politik, militer, dan ekonomi. Dengan demikian, monopoli yang merupakan tujuan VOC di Indonesia tercapai, baik di Makassar maupun di Indonesia bagian timur.

Akan tetapi, banyak kalangan yang tidak menyetujui perjanjian dengan Belanda, terutama kalangan yang bersimpati kepada kerajaan Gowa. Oleh karena itu, usaha untuk mendekati sekutu-sekutu lama dilakukan. Pada tahun berikutnya, peperangan antara Makassar di satu pihak, VOC dan Bugis di pihak lain berkobar kembali. Makassar kembali dilanda kekalahan, istananya bahkan mendapat serangan pada tahun 1669. Sultan Hasanuddin terpaksa mengungsi. Sebelum istana Somboapu jatuh, Sultan Hasanuddin turun dari tahta dan diganti oleh putra I Mappasomba, Sultan Amir Hamzah. Kekalahan Gowa ini membuatnya berada di bawah kekuasaan Bone.

---

<sup>12</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 237-238

<sup>13</sup> Fatah Syukur, 2010, hlm. 216

Penetrasi politik Belanda juga terjadi di kerajaan Banjarmasin. Belanda pertama kali datang ke kerajaan ini pada awal abad ke-17. Mereka dengan susah payah mendapatkan izin untuk berdagang. Karena dipandang merugikan pedagang Banjar sendiri, para pedagang Belanda ini akhirnya diusir dari sana. Posisi mereka kemudian diisi oleh para pedagang asal Inggris. Namun, yang terakhir ini pun diusir dari kerajaan itu dengan alasan yang sama. Setelah pedagang Inggris meninggalkan Banjarmasin pada dasawarsa ketiga abad ke-18, Banjar didatangi lagi oleh pedagang Belanda. Mereka mendekati Sultan Tahlilillah, dan tahun 1734, mereka berhasil mengadakan perjanjian dan mendapat fasilitas perdagangan di kerajaan itu.

Pada mulanya, mereka masih sangat tergantung kepada kebijakan sultan. Kesempatan untuk memperbesar pengaruh dalam kerajaan Banjar baru mereka peroleh ketika terjadi konflik antara Pangeran Amir dan Pangeran Nata. Pangeran Amir yang lebih disenangi rakyat tersingkir dalam persaingannya memperebutkan tahta kerajaan dengan Pangeran Nata yang mendapat bantuan Belanda. Pangeran Amir akhirnya dapat ditangkap dan dibuang ke Ceylon.

Sejak kemenangan Pangeran Nata terhadap Pangeran Amir itu, sedikit demi sedikit kekuasaan Belanda semakin besar dan kokoh. Setiap kali perjanjian yang diadakan antara Belanda dan sultan, selalu wilayah kekuasaan Belanda semakin bertambah.

Seluruh wilayah kesultanan Banjarmasin, kecuali daerah Hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin, sudah masuk dalam kekuasaan Belanda. Hal itu didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Sultan Adam Alwasik Billah (memerintah tahun 1825-1857) dan Belanda, 4 Mei 1826. Untuk memperkokoh kedudukannya, Belanda mengangkat seorang gubernur di daerah itu. Ini berarti secara *de facto*, Belanda sudah menjadi penguasa politik. Ini pula yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Antasari.<sup>14</sup>

Islam berkembang di Tidore diduga berasal dari Malaka, Kalimantan atau Jawa, banjar dan Giri atau Gersik cukup besar pengaruhnya dalam sosialisasi Islam di Ternate dan Tidore, sebelum terjadi arus balik, yakni penyebaran Islam dari Ternate ke arah barat yakni ke Buton dan daerah lain di Sulawesi Selatan. Keberhasilan mengusir Portugis tidak sekaligus berarti kemenangan kerajaan. Menjelang 1660, Ternate dan Tidore justru menjadi kerajaan-kerajaan taklukan VOC, organisasi dagang Belanda yang menghendaki monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan Nusantara umumnya.

Pola yang sama terbukti ampuh untuk melumpuhkan kerajaan-kerajaan Nusantara. Menurut tradisi, otoritas kesultanan Tidore berlangsung lebih dari dua abad, setidaknya dari 1460, ketika raja Tidore pertama kali masuk Islam, sampai 1660 ketika VOC memantapkan posisinya sebagai pemegang hegemoni kekuasaan di wilayah seribu pulau itu. Selain itu, VOC berkuasa setelah menyisihkan kekuatan Portugis dan Spanyol.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 240-241

<sup>15</sup> Hasan Muarif Ambary, 1998, *Menemukan Peradaban*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu), hlm.153-154



Di Sumatera, kerajaan-kerajaan Islam dengan cepat dikuasai Belanda, kecuali Aceh. Setelah Malaka jatuh ke tangan Belanda tahun 1641, terbentuk aliansi-aliansi baru antara Jambi, Palembang dan Makasar. Namun aliansi-aliansi ini bubar ketika VOC ikut campur dan meminta untuk tanda tangan kontrak dengan VOC.<sup>16</sup>

Penetrasi VOC ke Minangkabau dijalankan dengan menggunakan strategi sejak tahun 1663. Panglima Aceh yang berkedudukan di Minangkabau dan raja Minangkabau diberi kredit dalam transaksinya. Setelah itu, dengan cepat VOC mengadakan kontrak dengan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Minangkabau. Akibatnya, hubungan antara Minangkabau dan Aceh terputus.

Mungkin hanya Aceh yang menikmati kemerdekaannya sampai pertengahan abad ke-19. Selain Aceh berada di kekuasaan Belanda. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa usaha mengadakan perlawanan untuk membebaskan diri dari pengaruh Belanda tidak ada, bahkan sangat banyak bagi tak pernah putus-putusnya.<sup>17</sup>

## 2. Politik Islam Hindia Belanda

Daerah-daerah yang paling cepat menerima kekuasaan Belanda pada abad ke-17 dan 18 adalah daerah-daerah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari perdamaian dengan para saudagar VOC dan memisahkan diri dari klaim-klaim kerajaan pusat yakni pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara dan Madura. Daerah-daerah ini juga merupakan daerah yang perembesan Islamnya paling dalam.<sup>18</sup>

Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti, karena itu raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Bahkan kewibawaan raja sangat tergantung pada VOC. Campur tangan kolonial terhadap kehidupan keraton semakin meluas, sehingga ulama-ulama keraton sebagai penasehat raja-raja tersingkir. Rakyat kehilangan kepemimpinan sementara penguasaan kolonial sangat menghimpit kehidupan mereka. Eksploitasi hasil bumi rakyat untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda merajalela, pengusuran dan perampasan tanah milik rakyat untuk kepentingan pemerintah semakin digalakan. Raja-raja tradisional jarang membantu rakyat, bahkan setelah mendapat gaji mereka memihak kepada tuannya (Belanda). Rakyat ketakutan dan kesulitan menghadapi penindasan, dan hal ini terjadi sampai abad ke-14. Dalam kondisi seperti ini rakyat mencari pemimpin non formal (para ulama, kiyai, atau bangsawan) yang masih memperhatikan mereka. Pusat kekuasaan politik berpindah dari istana keluar, yaitu ke wilayah-wilayah yang

---

<sup>16</sup> Fatah Syukur, 2010, hlm. 216

<sup>17</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 241-241

<sup>18</sup> Ahmad Ibrahim, dkk., 1989, *Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI), hlm. 80

jauh dari istana, salah satunya ke pesantren-pesantren yang kemudian menjadi basis perlawanan.<sup>19</sup>

Indonesia merupakan negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Agama Islam secara terus menerus menyadarkan pemeluknya bahwa mereka harus membebaskan diri cengkraman pemerintahan kafir. Perlawanan dari raja-raja Islam terhadap pemerintahan kolonial bagai tak pernah henti. Padam di suatu tempat muncul di tempat lain. Oleh karena itu, ajaran Islam dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Seiring dengan itu, di sana juga diselenggarakan *indologie*, ilmu untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk penduduk Indonesia. Semua itu dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hasil dari pengkajian itu, lahirlah apa yang dikenal dengan “politik Islam”. Tokoh utama dan peletak dasarnya adalah Prof. Snouck Hurgronje. Dia berada di Indonesia antara tahun 1889 dan 1906. Berkat pengalamannya di Timur Tengah, sarjana sastra Semit ini berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan menghadapi Islam di Indonesia, yang menjadi pedoman bagi pemerintah Hindia Belanda, terutama bagi *Adviseur voor Inlandsche zaken*, lembaga penasihat gubernur Jenderal tentang segala sesuatu mengenai pribumi.<sup>20</sup>

Setelah Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, jumlah jamaah menuju Makkah sangatlah bertambah, pada waktu yang sama arus masuknya orang Arab Hadramaut semakin tinggi pula sehingga meningkatkan pertumbuhan ortodoksi Islam di Indonesia.<sup>21</sup> Dapat dikatakan bahwa setiap tahun terdapat ribuan umat Islam Indonesia pulang dari Makkah sehabis menunaikan ibadah haji. Mereka datang dengan ajaran ortodoks menggantikan ajaran mistik dan sinkretik.<sup>22</sup> Adanya kebekuan intelektual di Indonesia saat itu disebabkan karena umat Islam mempersoalkan hal yang tak beranjak dari pokok masalahnya dan mereka (umat Islam) baru tergugah pikirannya dengan datangnya ajaran ortodoks yang menuntut adanya keselarasan antara hidup pribadi dan ajaran sunnah.<sup>23</sup>

Akhirnya, ortodoksi Islam, perlahan-lahan dengan perjuangan sengit dapat mengambil alih pengaruh mistisisme Islam baik di Jawa maupun Sumatra. Bilamana sekolah-sekolah dusun tradisional sebagian besar memperhatikan orientasi sinkretiknya, maka kyai yang telah mendapatkan pelatihan di Makkah membangun pesantren yang semakin menarik siswa-siswanya dalam jumlah besar.<sup>24</sup>

Pada saat itu banyak perlawanan umat Islam yang dimotori oleh para haji dan ulama, sehingga banyak kalangan Belanda yang berpendapat bahwa ibadah haji menyebabkan

---

<sup>19</sup> Musyrifah Sunanto, 2010, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 29

<sup>20</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 252-253

<sup>21</sup> Harry J. Benda, 1980, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya), hlm. 36-37

<sup>22</sup> Badri Yatim, 2008, 252-253

<sup>23</sup> Taufik Abdullah, 1987, *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 18

<sup>24</sup> Harry J. Benda, 1980, hlm. 37

pribumi menjadi “fanatik”. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan banyak peraturan untuk mempersulit kaum muslim dalam menunaikan ibadah.

Dalam hal ini, Snouck Hurgronje berusaha mendudukan masalah antara ibadah haji dan fanatisme. Menurutnya, haji-haji itu tidak berbahaya bagi kedudukan pemerintah kolonial di Indonesia. Yang mungkin sekali berbahaya adalah apa yang disebutnya *koloni Jawa* ( daerah tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Indonesia di Makkah).<sup>25</sup> Karena itu, Snouck memformulasikan konsep politiknya dengan mengasumsikan bahwa ajaran-ajaran Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Bidang agama atau ibadah murni, Snouck menganjurkan agar dalam bidang ibadah murni, pemerintahan kolonial memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya bagi umat Islam untuk melaksanakannya.
- b. Bidang sosial-kemasyarakatan, pemerintah kolonial hendaknya memberikan bantuan kepada umat Islam dan sekaligus memanfaatkan adat-kebiasaan yang berlaku untuk mendekatkan rakyat kepada Belanda.
- c. Bidang politik, pemerintah kolonial harus memangkas habis setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islam.<sup>26</sup>

Bahkan, dalam analisisnya itu, Snouck Hurgronje mengusulkan agar pemerintah mau untuk meningkatkan pelayanan haji, karena haji termasuk wilayah netral. Meskipun demikian, batas antara sikap netral dan campur tangan terhadap agama, bahkan antara membantu dan menghalangi, tidak begitu jelas. Pemerintah Belanda tetap saja banyak mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengontrol secara ketat lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Dalam rangka membendung pengaruh Islam, pemerintah Belanda mendirikan lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama untuk kalangan bangsawan. Mereka harus ditarik ke arah westernisasi. Snouck Hurgronje berpandangan dan mendambakan adanya kesatuan Indonesia dan Belanda dalam suatu ikatan *Pax-Neerlandica*. Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan Belanda tersebut, bangsa Indonesia harus dituntun untuk bisa berasosiasi dengan kebudayaan Belanda. Menurutnya, pendidikan Barat adalah alat yang paling pasti untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Sekalipun, mereka sering kali terlibat dalam persaingan dengan golongan Islam. Kedua golongan itu, ternyata disatukan oleh rasa nasionalisme yang sama. Oleh karena itu, mereka bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Melalui lembaga pendidikan itu, ternyata gagasan *Pax-Neerlandica* tidak tercapai, bahkan lulusan-lulusannya menjadi orang-orang yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 253

<sup>26</sup> Lathiful Khuluq, 2002, *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), hlm.43-44

<sup>27</sup> Badri Yatim, 2008, hlm. 254-255

Menurut Snouck Hurgronje potensi pribumi dan teorinya tentang pemisahan unsur agama dari unsur politik, tidak sejalan dengan perkembangan situasi, terutama dua puluh tahun terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu peranan politik *Kantoor voor Inlandsche Zaken* semakin menghilang pada tahun-tahun terakhir, meskipun wewenangnya mengawasi gerakan politik lebih dipertegas sejak tahun 1931. *Kantoor* ini memang harus menjamin kelangsungan pemerintah Hindia Belanda.<sup>28</sup>

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, sebagai berikut:

- Secara garis besar kondisi dan situasi kerajaan-kerajaan Islam nusantara menjelang datangnya Belanda di akhir abad ke-16 dan abad ke-17 ke Indonesia berbeda-beda. Ada kerajaan Islam yang sudah lebih dulu terbentuk dan proses islamisasinya sudah berlangsung lama, tapi ada juga kerajaan Islam yang baru ada dan baru memulai proses islamisasi.
- Pada kali pertama, tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah sangat dibutuhkan di Eropa. Serikat dagang *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) didirikan dengan tujuan untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan bangsa-bangsa Barat lainnya, dan juga ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan.
- Penetrasi Belanda dalam dunia politik seringkali justru diundang oleh konflik internal suatu kerajaan atau konflik antar kerajaan di Indonesia. Di Jawa VOC mengambil keuntungan dengan adanya konflik internal di Mataram, yang mengakibatkan Mataram pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Sementara di Sulawesi, VOC secara cerdas memanfaatkan konflik antar kerajaan, yaitu antara Gowa-Talo melawan Bone. Di Sumatera, kerajaan-kerajaan Islam dengan cepat dikuasai Belanda, kecuali Aceh. Penetrasi VOC ke Minangkabau dijalankan dengan menggunakan strategi yang cerdas sejak tahun 1663. Meskipun demikian, selalu ada usaha dari kerajaan Islam nusantara untuk mengadakan perlawanan dan membebaskan diri dari pengaruh Belanda.

### IV. PENUTUP

Demikianlah makalah ini saya sampaikan, saya sadar masih banyak kekurangan dalam makalah ini baik dalam penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak.

---

<sup>28</sup> Fatah Syukur, 2010, hlm. 222

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1987, *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ambary, Hasan Muarif, 1998, *Menemukan Peradaban*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Benda, Harry J., 1980, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hasmy, A., 1989, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Percetakan Offset.
- Huda, Nur, 2007, *Sejarah Sosial Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ibrahim, Ahmad, dkk., 1989, *Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI.
- Khuluq, Lathiful, 2002, *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Sunanto, Musyrifah, 2010, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syukur, Fatah, 2010, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Yatim, Badri, 2008, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.